

Menganalisis Perbandingan Administrasi Publik pada Negara Thailand dan Jepang

Mutiara Salsabila¹, Bagas Dermawan², Fadel³, Afrizal⁴, Retdian Tarissaputra⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: aramuti132@gmail.com¹, bagasdermawan007@gmail.com², fadelsygmama@gmail.com³, afzhr038729@gmail.com⁴, retdiantariss@gmail.com⁵

Article History:

Received: 28 Juni 2024

Revised: 08 Juli 2024

Accepted: 10 Juli 2024

Keywords: *Perbandingan, Administrasi Publik, Jepang, Thailand, Sistem Pemerintahan*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan administrasi negara Thailand dan Jepang berdasarkan bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem politik. Kedua negara ini memiliki kesamaan sebagai monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer, namun berbeda dalam stabilitas politik dan dinamika pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masing-masing negara mengelola administrasi publiknya.*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan suatu negara maka diperlukan Administrasi Publik karena menjadi krusial dalam roda pemerintahan di setiap negara. Sistem administrasi yang efektif dan efisien diperlukan untuk mencapai tujuan negara dan melayani masyarakat dengan baik. Memahami sistem administrasi di berbagai negara dapat membantu kita untuk belajar dari pengalaman mereka dan mengembangkan sistem administrasi yang lebih baik di negara kita sendiri. Administrasi publik komparatif melibatkan analisis sistem, struktur, dan praktik administrasi yang berbeda di berbagai negara. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bagaimana faktor budaya, politik, ekonomi, sejarah, dan lainnya mempengaruhi perkembangan dan kinerja administrasi publik dalam konteks yang berbeda. Selain itu, perbandingan ini juga dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi dan diadaptasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik di negara lain.

Ketika membandingkan administrasi publik, perlu dipertimbangkan berbagai aspek, seperti struktur organisasi pemerintah, proses pengambilan keputusan, mekanisme akuntabilitas, sistem anggaran, dan manajemen sumber daya manusia. Studi banding ini memberikan wawasan yang kaya dan beragam, karena setiap negara memiliki pendekatan dan model berbeda untuk mengatasi aspek-aspek tersebut. Pendekatan komparatif terhadap administrasi publik juga dapat membantu mengidentifikasi tantangan-tantangan umum yang dihadapi oleh berbagai negara dalam upaya mereka meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Misalnya, isu-isu seperti korupsi, inefisiensi, dan keterbatasan sumber daya manusia seringkali menjadi masalah global. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih strategis dalam membangun pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Jepang merupakan negara yang berada di Asia Timur, terkenal sebagai kekuatan ekonomi

global terkemuka dengan teknologi mutakhir, industri manufaktur yang berkembang pesat, dan warisan budaya yang dinamis. Selain itu, Jepang dikenal luas karena sistem pendidikannya yang sangat ketat dan masyarakatnya yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadatnya. Sedangkan Thailand berada di Asia Tenggara yang dikenal dengan garis pantai tropisnya yang menakjubkan dan warisan budayanya yang dinamis, memiliki masa lalu yang penuh kisah sebagai sebuah kerajaan yang kaya akan seni tradisional dan keajaiban arsitektur. Sektor pariwisata yang berkembang secara konsisten memikat jutaan pengunjung setiap tahunnya, yang dengan penuh semangat membenamkan diri dalam keajaiban alam dan kemegahan budaya yang melimpah di negara ini. Thailand dan Jepang adalah dua negara yang berada di Asia memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Meskipun keduanya adalah monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer, ada perbedaan signifikan dalam cara mereka mengelola administrasi negara. Penelitian ini akan membahas perbedaan dan persamaan dalam bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem politik pada kedua negara tersebut.

LANDASAN TEORI

Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya publik diorganisasikan dan dikoordinasikan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Teori Klasik (Weberian Bureaucracy) yang dikemukakan oleh Max Weber, teori ini menekankan pada struktur birokrasi yang hierarkis, aturan yang jelas, dan impersonalitas dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan Pendekatan Komparatif yang dimana untuk menganalisis persamaan dan perbedaan dalam administrasi publik di berbagai negara. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana faktor-faktor seperti budaya, sejarah, dan struktur politik mempengaruhi administrasi publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari berbagai sumber sekunder termasuk buku, artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan sumber daring yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Thailand

a. Bentuk Negara

Thailand berawal dari Sukhothai, yang didirikan pada awal abad ke-13 dan secara umum dianggap sebagai kerajaan Thailand pertama yang benar-benar merdeka. Di sini, khususnya di bawah pemerintahan Raja Ramkhamhaeng yang Agung (1275-1317), lahirlah cita-cita seorang penguasa paternalistik yang tanggap terhadap kebutuhan rakyatnya dan menyadari kenyataan bahwa tugasnya adalah membimbing mereka, sebuah pandangan yang sangat berbeda dari kepemimpinan ilahi yang dipraktikkan oleh orang-orang Khmer. Cita-cita paternalistik kadang kala hilang selama periode Ayutthaya yang panjang, ketika pengaruh Khmer mengenai kepemimpinan kerajaan muncul kembali dan raja menjadi sosok yang agung dan sulit dijangkau, yang jarang terlihat oleh sebagian besar warga negara. Meskipun demikian, era empat abad menyaksikan pemerintahan beberapa penguasa luar biasa yang prestasinya sangat luas. Dengan berdirinya Dinasti Chakri pada tahun 1782 dan didirikannya Bangkok sebagai ibu kota, kepemimpinan kerajaan terutama didasarkan pada kepatuhan terhadap konsep kebajikan Buddha.

Thailand sebelumnya dikenal sebagai Siam, sebuah negara yang terletak di tengah semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Dengan luas wilayah sekitar 513.000 km persegi (198.000 mil persegi), Thailand adalah negara terluas ke-50 di dunia dan negara terpadat ke-20 di dunia, dengan sekitar 66 juta penduduk. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Bangkok. Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laos di sebelah utara, Laos dan Kamboja di sebelah timur, Teluk Thailand dan Malaysia di sebelah selatan, dan Laut Andaman serta ujung selatan Myanmar di sebelah barat. Batas maritimnya meliputi Vietnam di Teluk Thailand di sebelah tenggara, serta Indonesia dan India di Laut Andaman di sebelah barat daya. Thailand menjadi negara industri baru dan eksportir utama pada tahun 1990-an dalam bidang Manufaktur, pertanian, dan pariwisata merupakan sektor-sektor utama ekonominya.

b. Bentuk Pemerintahan

Saat ini, Thailand adalah negara monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan yang demokratis. Sejak tahun 1932, raja-raja Thailand telah menjalankan kekuasaan legislatif konstitusional mereka melalui Majelis Nasional bikameral. Raja-raja Thailand menjalankan kekuasaan eksekutif melalui kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan kekuasaan yudikatif melalui pengadilan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam kehidupan politik Thailand, Raja memberikan pengaruh moral yang kuat pada isu-isu yang dipilih dengan saksama. Thailand menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sepanjang 1932 - 2006, Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Monarki Absolut Thailand dihapus sejak tahun 10 Desember 1932.

c. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan Thailand ialah parlementer yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisapha) yang beranggotakan 150 orang. Berdasarkan pasal 107 konstitusi 2017, senator dipilih dari kelompok profesional dan sosial, yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di berbagai bidang masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun.

Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung (Sandika) meliputi pengadilan negeri, mahkamah konstitusi, dan peradilan tata usaha negara, yang anggotanya berasal dari sistem selektif. Saat ini Thailand berada di bawah Konstitusi 2017. Administrasi Publik Thailand memiliki tiga tingkatan pemerintahan: Administrasi Pusat yang terdiri dari kementerian dan birokrasi. Administrasi Provinsi yang terdiri dari 76 provinsi kecuali Bangkok, dan Administrasi Lokal yang terdiri dari organisasi administrasi provinsi, organisasi administrasi kota, organisasi administrasi distrik, Bangkok dan Daerah Administratif Khusus Pattaya. Bangkok berperan sebagai pusat administrasi publik negara, Bangkok juga merupakan ibu kota dan kota terbesar di negara itu yang punya sejarah panjang.

1) Badan Legislatif:

- a) Parlemen: Terdiri dari dua kamar: Dewan Perwakilan Rakyat (500 anggota) dan Senat (250 anggota).
- b) Dewan Perwakilan Rakyat: Dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

- c) Senat: 200 anggota ditunjuk oleh Raja dan 50 anggota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 - d) Fungsi: Membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, mengawasi kinerja pemerintah, dan meminta pertanggungjawaban menteri.
- 2) Badan Eksekutif:
- a) Perdana Menteri: Ditunjuk oleh Raja atas saran Dewan Perwakilan Rakyat.
 - b) Kabinet: Terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung jawab atas berbagai bidang pemerintahan.
 - c) Fungsi: Melaksanakan kebijakan publik, mengelola keuangan negara, dan mewakili Thailand di dunia internasional.
- 3) Badan Yudikatif:
- a) Mahkamah Agung: Pengadilan tertinggi di Thailand, memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, menyelesaikan sengketa hukum, dan membatalkan peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang.
 - b) Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri: Membentuk sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Hukum Thailand didasarkan pada hukum perdata, tetapi telah dipengaruhi oleh hukum umum. Konstitusi Thailand adalah hukum tertinggi Thailand yang berlaku atas hukum lain yang disahkan oleh parlemen. Mahkamah Konstitusi Thailand memiliki yurisdiksi untuk membuat keputusan atas konstitusionalitas tindakan parlemen, keputusan kerajaan, rancangan undang-undang, pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan partai politik. Tindak pidana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand dan sejumlah undang-undang lainnya. Prosedur pidana diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Masalah hukum administrasi seperti peninjauan kembali ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Tata Cara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 2542 Tahun 1999.

d. Sistem Politik

Sejak awal abad ke-21, Angkatan Darat Kerajaan Thailand, unit militer terbesar di Thailand telah memerangi pemberontakan berdarah di provinsi-provinsi paling selatan, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam berbahasa Melayu. Angkatan darat juga terus menghadapi serangan di perbatasan barat dan utara oleh pemberontak yang memerangi pemerintah di Myanmar dan oleh pasukan militer dari Myanmar yang terkadang mengejar pemberontak tersebut hingga ke seberang perbatasan.

Militer telah memainkan peran dominan dalam politik Thailand, terutama sejak berakhirnya kekuasaan absolut oleh raja pada tahun 1932; militer sering mengambil alih kekuasaan melalui kudeta. Protes publik yang kuat terhadap kudeta pada tahun 1991, pengunduran diri setelah campur tangan kerajaan dari pemerintah yang dipimpin oleh seorang jenderal pada tahun 1992, dan langkah-langkah berikutnya untuk memastikan pemerintahan yang demokratis yang berpuncak pada konstitusi tahun 1997 pada awalnya tampaknya telah mengakhiri dominasi militer dalam sistem

politik Thailand. Namun, kudeta militer September 2006 membuktikan bahwa pola tersebut memang terus berlanjut.

Thailand memiliki sistem multipartai, di mana banyak partai politik dengan ideologi dan platform yang berbeda bersaing untuk kekuasaan. Pemilu diadakan setiap empat tahun untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem politik Thailand memiliki banyak partai politik, yang menggambarkan akan keragaman masyarakat Thailand. Berikut partai politik utama di Thailand diantaranya:

- 1) Partai Pheu Thai: Partai terbesar di Thailand, yang umumnya mewakili kepentingan pedesaan dan kelas pekerja.
- 2) Partai Demokrat: Partai oposisi utama, yang umumnya mewakili kepentingan elit perkotaan dan kelas menengah.
- 3) Partai Bhumjaithai: Partai yang didirikan oleh mantan junta militer, yang umumnya mewakili kepentingan militer dan nasionalis.

Pada masa sekarang ini sistem politik Thailand sedang mengalami tekanan akibat dari adanya beberapa partai politik yang menyerang monarki dan beberapa kebijakan terkait monarki masih menjadi isu sensitive terkait Undang-undang Lese-majeste yang melindungi raja dari kritik dengan mengancam hukuman berat bagi mereka yang terbukti melanggar, sering dikritik oleh aktivis HAM dan di luar negeri. sehingga mengakibatkan masyarakat Thailand sering melakukan demonstrasi untuk menuntut reformasi sistem pemerintahan monarki dan meningkatkan demokrasi, serta menggunakan simbol-simbol budaya populer dalam aksi unjuk rasa untuk menentang struktur kekuasaan yang ada.

2. Jepang

a. Bentuk Negara

Berawal dari berakhirnya kejayaan samurai dan shogun atau dikenal dengan zaman Meiji, bentuk pemerintahan negara Jepang kemudian mulai dipertimbangkan. Seiring berjalannya waktu, terlebih setelah masa Perang Dunia II tepatnya pada tahun 1947 Jepang kemudian mengeluarkan UUD Jepang sebagai simbol demokrasi pada masa itu. Dengan adanya konstitusi baru tersebut, negara Jepang kemudian didaulat sebagai salah satu negara yang menganut paham pasifisme atau paham cinta damai serta menerapkan praktek sistem demokrasi liberal.

Jepang terletak di Asia Timur, di sebelah timur Benua Asia. Negara ini terdiri dari sekitar 6.852 pulau dengan pulau Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku sebagai pulau utama. Jepang berada di urutan ke-61 negara terluas di dunia, di antara Vietnam dan Bulgaria karena memiliki luas wilayah 377.975 kilometer persegi dengan 73% wilayah Jepang adalah pegunungan, dan 20% yang datar dan cocok untuk tempat permukiman. Jumlah penduduk Jepang adalah 127.420.944 jiwa. Angka ini menempatkan Jepang di urutan ke-11 negara terpadat di dunia, setelah Filipina dan sebelum Vietnam karena Jepang mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir karena tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang menua.

Selain itu, Jepang juga terkenal karena tingkat pertumbuhan ekonominya yang luar biasa pesat pada abad ke-20. Di Jepang setidaknya terdapat 47 prefektur atau provinsi dan lebih dari 3300 pemerintah daerah yang masuk dalam 47 prefektur yang dimana pada masing-masing provinsi tersebut sudah terdapat gubernur dan majelis perwakilan nya. Jepang adalah salah satu kekuatan ekonomi dalam bidang manufaktur dan jasa yang sangat beragam dan merupakan salah satu produsen

kendaraan bermotor, baja, dan barang manufaktur berteknologi tinggi terbesar di dunia.

b. Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan negara Jepang adalah monarki konstitusional dapat diartikan bahwa Kaisar Jepang memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Di Jepang sendiri Kaisar merupakan kepala negara yang ditetapkan sebagai simbol negara, terutama dalam urusan diplomatik dengan negara lain. Disisi lain, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan beberapa anggota yang terpilih dari parlemen jepang. Dapat diartikan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Perdana Menteri berasal dari partai mayoritas atau koalisi dalam parlemen. Perdana menteri yang menjadi kepala pemerintahan di Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai “Simbol negara dan pemersatu rakyat”. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik.

c. Sistem Pemerintahan

Pemerintahan Jepang (日本国政府, Nihonkoku-seifu atau Nipponkoku-seifu) adalah sebuah monarki konstitusional yang di dalamnya terdapat kuasa dari seorang Kaisar yang masih dibatasi dan hanya diturunkan terutama ketika melakukan tugas resmi. Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Di sistem parlementer, kepala negara bisa menjadi seorang presiden atau raja, tetapi kekuasaan eksekutif sebagian besar dilakukan oleh perdana menteri atau kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Di Jepang sendiri lembaga negara telah diatur dalam UUD 1947 terkait 3 kekuasaan tertinggi, yaitu, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (naikaku), kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen (Diet, Kokkai) dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh MA (Saikou-Saibansho). berikut kekuasaan tertinggi yang berada di Jepang, diantaranya:

- 1) Legislatif, pada dasarnya dijalankan sesuai dengan kekuasaan parlemen atau diet. Sistem parlemen di Jepang menjalankan prinsip dua kamar yang biasa disebut sebagai Kokkai yang terdiri atas Majelis Tinggi (Sangi-in) dan Majelis Rendah (Shuugi-in).
- 2) Eksekutif, dijalankan oleh kabinet. Anggota kabinet terdiri atas menteri-menteri terpilih dan Perdana Menteri. Pemerintahannya memiliki tanggung jawab atas : pelayanan publik, pendidikan dan pembangunan, dari 3 tanggung jawab tersebut maka menjadikan negara Jepang yang maju dikarenakan sering menciptakan inovasi-inovasi baru terutama dalam bidang teknologi. Perdana menteri adalah kepala pemerintahan membantu dalam mengarahkan pemerintahan dan menyusun rancangan undang-undang untuk diserahkan ke Parlemen Jepang.
- 3) Yudikatif, kekuasaan tugas lembaga yudikatif di Jepang berada di tangan Mahkamah Agung serta pengadilan yang lebih rendah dari MA seperti pengadilan di setiap distrik, pengadilan tinggi serta pengadilan sumir. MA beranggotakan dari Ketua MA yang didampingi oleh 14 hakim lain yang mana semuanya ditunjuk oleh kabinet. Mahkamah Agung mengawasi sistem empat

pengadilan yang lebih rendah, diantaranya: Pengadilan Tinggi, yang memutuskan banding atas putusan pengadilan yang lebih rendah; Pengadilan Distrik; Pengadilan Keluarga; dan Pengadilan Ringkasan

Jepang memiliki salah satu parlemen tertua di dunia yang dikenal sebagai “Diet,” didirikan berdasarkan Konstitusi Meiji pada tahun 1889 dan pemilihan umum pertama untuk parlemen diadakan pada tahun 1890. Majelis ini bersifat “bikameral” – terbagi menjadi dua majelis, majelis tinggi (Dewan Penasihat) dan majelis rendah (Dewan Perwakilan Rakyat). Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480 Anggota Dewan dari gabungan 289 daerah pemilihan dengan satu kursi dan 176 kursi yang ditentukan oleh perwakilan proporsional di 11 distrik dengan banyak anggota. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah dibubarkan. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah majelis yang dominan di badan legislatif, yang memiliki kewenangan untuk memberlakukan undang-undang, menyetujui perjanjian, mengesahkan anggaran, dan memilih perdana menteri. Jika majelis tinggi menolak rancangan undang-undang yang disahkan oleh majelis rendah, rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang jika disahkan lagi oleh majelis rendah dengan suara dua pertiga. Anggota dewan harus berusia minimal 30 tahun, sedangkan di Dewan Perwakilan Rakyat berusia 25 tahun. Dalam setiap pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (ketika setengah dari anggotanya, atau 121 kursi dipertaruhkan), 73 kandidat dipilih dari daerah pemilihan satu kursi di 47 prefektur negara dan 48 dipilih secara nasional melalui perwakilan proporsional.

d. Sistem Politik

Jepang didaulat sebagai salah satu negara yang menganut paham pasifisme atau paham cinta damai serta menerapkan praktek sistem demokrasi liberal. Oleh karena itulah Jepang kemudian tidak diizinkan untuk mengembangkan industri dalam bidang persenjataan serta tidak membentuk angkatan militer. Sebagai gantinya, sistem pertahanan negaranya menerapkan sistem pemerintahan sipil dan wajib militer. Jepang aktif dalam diplomasi internasional dan memiliki aliansi kuat dengan Amerika Serikat. Hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Cina dan Korea Selatan sering kali menjadi isu penting dalam kebijakan luar negeri.

Di negara Sakura ini bagi masyarakat yang telah berusia 20 tahun lebih diberikan hak untuk memilih. Sistem pemilu di Jepang menggunakan sistem campuran yang menggabungkan distrik mayoritas (single-member districts) dan representasi proporsional (proportional representation). Salah satu yang unik dari Jepang adalah pemilunya dilaksanakan pada hari Minggu dan berlangsung di beberapa fasilitas umum termasuk sekolah.

Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1933. Pada tahun itu terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Secara umum, Kamar Bawah mempunyai kekuasaan lebih besar daripada Senate, yakni:

- 1) Kamar Bawah menyidangi RAPBN terlebih dulu daripada Senate (pasal 60-1)
- 2) Bila penetapan kamar bawah dan Senate berbeda tentang RAPBN, penetapan kamar bawah menjadi penetapan diet. (pasal 60-2)
- 3) Kamar bawah mempunyai hak motion of nonconfidence terhadap kabinet.

- 4) Bila kamar bawah meluluskan RUU tapi Senate menolaknya, kamar bawah bisa memperundangkannya dengan mayoritas 2/3.(pasal 59-2)
- 5) Bila kamar bawah meluluskan RUU (dan perjanjian internasional) tapi Senate menetapkannya selama 60 hari, maka RUU tersebut diperundangkan secara otomatis.(pasal 59-4 dan pasal 61).

Saat ini, partai perdana menteri (Democratic Party) menguasai mayoritas di kamar bawah, tetapi tidak menguasai mayoritas di Senate. Maka Perdana menteri sangat susah menjalankan kebijakan sehari-hari, karena kondisi ini karena kursi partai Perdana Menteri tidak sampai 2/3 mayoritas di Kamar Bawah.

Partai-partai politik yang diakui secara resmi memiliki kursi di Parlemen. Beberapa partai politik yang terwakili di Diet Nasional antara lain:

- 1) Partai Demokrat Liberal (LDP): Partai ini dominan dalam politik Jepang dan telah memimpin pemerintahan sejak tahun 1955.
- 2) Partai Demokrat Konstitusional (Rikken Minshu-tō): Partai ini memiliki peran penting dalam politik Jepang dan telah memimpin pemerintahan beberapa kali.
- 3) Komeito: Partai ini memiliki basis pendukung yang kuat dan telah memimpin pemerintahan beberapa kali.
- 4) Nippon Ishin no Kai: Partai ini memiliki basis pendukung yang kuat dan telah memimpin pemerintahan beberapa kali.

KESIMPULAN

Meskipun Thailand dan Jepang memiliki beberapa kesamaan dalam struktur administratif mereka, terdapat perbedaan signifikan dalam stabilitas politik dan dinamika pemerintahan. Jepang menunjukkan stabilitas politik yang lebih besar dengan dominasi partai politik yang konsisten, sementara Thailand sering mengalami perubahan drastis akibat intervensi militer. Pemahaman tentang perbedaan ini penting untuk mengapresiasi kompleksitas administrasi publik di kedua negara.

Jepang dan Thailand sama-sama menganut sistem pemerintahan parlementer dengan monarki sebagai kepala negara simbolis bahkan memiliki sistem pemerintahan yang demokratis dengan pembagian kekuasaan yang jelas. Namun, masih terdapat ruang untuk meningkatkan partisipasi rakyat dan akuntabilitas pemerintah di kedua Negara, diantaranya: Di Jepang tidak ada batasan masa jabatan Perdana Menteri, sedangkan di Thailand dibatasi maksimal 8 tahun, Jepang memiliki badan legislatif bikameral (Diet) sedangkan Thailand memiliki badan legislatif unikameral (Dewan Perwakilan Rakyat) serta Jepang menggunakan sistem distrik multi-anggota untuk pemilihan badan legislatif, sedangkan Thailand menggunakan sistem proporsional.

DAFTAR REFERENSI

- Aulina, Nissa, Dkk. 2017. *Sistem Pemerintahan: Demokrasi Dan Monarki*. Vol. 01.
 Ellen, London. 2011. "Gambaran Umum Negara Thailand."
 Klass, Jo. 2017. "Pemerintahan Daerah Di Jepang."
 Marshal, Felix, Dina Thalentaria Nainggolan, Aqil Fajri Hidayat, and Liosantra Oskar. 2022. "Dampak Monarki Konstitusional Bagi Partisipasi Dan Demokrasi Rakyat Thailand Periode Raja Maha Vajiralongkorn." *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies* 3(2):158–68. doi: 10.33822/jpds.v3i2.6191.

- Pustaka, Cipta Adi. 1990. "Tim Ensiklopedi Nasional Indonesia, Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 7, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), Hlm. 416. Lihat Lampiran 1, Hlm. 103. 2." 1–24.
- Rahayu, Supriati H. 2022. "Problematika Integrasi Masyarakat Dalam Negara Thailand." 12:119–32.